

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Amiruddin, & Askin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amrani, H. (2019). *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Barlow, H. D. (1984). *Introduction to Criminology Third Edition*. Boston: Little Brown and Company.
- Chazawi, A. (2002). *pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Judifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- El Saha, M. I. (2020). *Adaptasi HAM dalam Hukum Perdata Islam Nusantara*. Jakarta: Teras Karsa Publisher.
- Forsythe, D. P. (2000). *Human Rights and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hakim, L. (2019). *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish: Yogyakarta.
- Handoko, D. (2015). *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Juni, E. H. (2012). *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Najih, M. (2014). *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Rusli Effendi, d. (1986). *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta.

Sinyo. (2014). *Anakku Bertanya Tentang LGBT*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama.

Wignjosoebroto, S. (1993). *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan*. Yogyakarta: FH UII.

### **Artikel dalam Jurnal**

Adnyani, P. D. (2022). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif HAM Internasional. *Ganesha Law Review Volume 4 Issue 1*, 51-68.

Ali, T. M., Suhaidi, & Mustamam. (2019). Penanggulangan Penyimpangan Seksual LGBT dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy). *Jurnal Ilmiah Metadata Volume 1 Nomor 3*, 209-221.

Asiah, N., Asfiyak, K., & Humaidi. (2021). Studi Tentang LGBT Perspektif Hukum Islam, Psikologi, dan HAM. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 2*, 137-148.

Asyari, F. (2017). LGBT dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legalitas Volume 2 Nomor 2*, 57-65.

Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Volume 2 Nomor 2*, 210-230.

Galih, Y. S. (2016). Suatu Telaah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume 4 Nomor 1*, 92-106.

Hartanto. (2016). Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kaus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. *Jurnal Indonesian Perspective Volume 1 Nomor 2*, 31-47.

Hayati, V. (2019). LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan Volume 14 Nomor 2*, 290-301.

Hitaminah, K., & Zainal, M. (2021). Studi Komparasi dan Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerkosaan, dan LGBT dalam Perspektif KUHP dan RKUHP 2015. *Justness Jurnal Hukum Politik dan Agama Volume 1 Nomor 1*, 93-121.

Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di

- Indonesia. *Jurnal Education and Development Volume 10 Nomor 1*, 546-552.
- Lumingkewas, F. (2016). Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan. *Jurnal Lex Crimen Volume V Nomor 1*, 21-27.
- Maliarta, I. N., Jaya, I. S., & Purwani, S. P. (2018). Kriminalisasi Hubungan Seksual Sesama Jenis yang Dilakukan oleh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *E-journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Volume 07 Nomor 04*, 1-15.
- Miskari. (2016). Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT dalam Perspektif HAM dan Pancasila). *Raheema Jurnal Studi Gender dan Anak Volume 3 Nomor 1*, 44-54.
- Mokodongan, D. W., R, S. A., & Sarapun, R. M. (2021). Tanggungjawab Pelaku Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 286 KUHP. *Jurnal Lex Crimen Volume IX Nomor 2*, 151-161.
- Muniri, A. S., & Ulfiyati, N. S. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Eksistensi LGBT di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti Volume 1 Nomor 1*, 11-26.
- Putri, D. W. (2022). LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia (LGBT in the Study of Human Rights in Indonesia). *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Volume 2 Nomor 1*, 88-100.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum: Cetakan Kedelapan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, S., & Hutapea, T. P. (2021). Pemidanaan Perkara Kesusilaan dalam Relevansinya Sebagai Perbuatan Melanggar Perintah Dinas. *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 10 Nomor 3*, 443-462.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah Volume 17 Nomor 22*, 81-95.
- Santoso, M. B. (2016). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share Social Work Journal Volume 6 Nomor 2*, 220-229.
- Samsu, H. (2018). Kedudukan Lesbian, gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex Et Societatis Volume VI Nomor 6*, 13-20.
- Samuel, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan. *Jurnal Lex Crimen Volume XI Nomor 1*, 128-137.
- Saputra, I. A., & Utama, I. A. (2018). Kriminalisasi Terhadap Perilaku Cabul Antar Orang Dewasa Sesama Jenis (Lesbian dan Gay). *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Volume 7 Nomor 2*, 1-15.

- Shabah, M. A. (2020). Perkawinan Sebagai HAM. *Jurnal Masalah Volume 11 Nomor 2*, 25-33.
- Shalihah, F. (2016). Hukum, Moral, dan Kekuasaan dalam Telaah (Hukum adalah Alat Teknis Sosial). *Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue 4*, 587-814.
- Sofyarto, K. (2018). Abu-abu Regulasi LGBT di Indonesia. *Jurnal Selisik Volume 4 Nomor 6*, 84-94.
- Subiharta. (2015). Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 4 Nomor 3*, 385-398.
- Taebenu, O. J. (2014). The Protection of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Rights According to Human Rights. *Jurnal Lex et Societatis Voluma II Nomor 8*, 98-109.
- Toelle, M. H. (2014). Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory). *Jurnal Refleksi Hukum Volume 8 Nomor 2*, 115-132.
- Wibowo, A. (2015). Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Kriminalisasi LGBT. *Jurnal Cakrawala Hukum Volume XI Nomor 1*, 96-108.
- Widayati, L. S. (2018). Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral. *Jurnal Negara Hukum Volume 9 Nomor 2*, 181-198.
- Widayati, L. S. (2018). Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). *Jurnal Info Singkat Volume X Nomor 3*, 1-6.
- Yansyah, R., & Rahayu. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia. *Jurnal Law Reform Volume 14 Nomor 1*, 132-146.
- Yosafak, H., & Mulyono, G. P. (2020). Analisis Fenomena Perilaku Penyimpangan Seksual (LGBT) di Indonesia dalam Pandangan Hukum Asasi Manusia. *Jurnal Yurispruden Volume 3 Nomor 1*, 12-23.

#### **Artikel dalam Internet**

- Amindoni, A. (2022, Mei 25). *Indonesia*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61567481> (diakses 28 Agustus 2022)
- Budianto, V. A. (2022, April 21). *Ilmu Hukum*. Retrieved from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/> (diakses 23 September 2022)

Erdianto, K. (2017, December 14). *News*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/14/12231251/mk-tolak-permohonan-uji-materi-pasal-kesusilaan-di-kuhp> (diakses 29 Agustus 2022)

Maycendya, V. (2020, January 31). *Student's Column*. Retrieved from Binus University Communication: <https://communication.binus.ac.id/2020/01/31/adakah-hak-untuk-lgbt/> (diakses 28 Agustus 2022)

Muftisany, H. (2016, Februari 29). *Analysis*. Retrieved from Republika: <https://news.republika.co.id/berita/o3a5s0388/lgbt-dalam-perspektif-hukum-di-indonesia> (diakses 2 Juli 2023)

Nabilla, F. (2022, Mei 10). *News*. Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/news/2022/05/10/130102/31-negara-yang-melegalkan-lgbt-apakah-indonesia-termasuk?page=1> (diakses 29 Agustus 2022)

Riadi, M. (2018, September 19). *Hukum*. Retrieved from KajianPustaka: <https://www.kajianpustaka.com/2018/09/pengertian-ukuran-dan-asas-kriminalisasi.html> (diakses 2 Juli 2023)

Saputra, A. (2016, Agustus 24). *Berita*. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-3282118/sidang-lgbt-dan-konsistensi-hakim-konstitusi-patrialis-akbar> (diakses 2 Juli 2023)

Yasin, M. (2016, Agustus 29). *Berita*. Retrieved from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/beginilah-riwayat-pasal-homoseksual-yang-kini-diributkan-lt57c3eb2e7914c> (diakses 22 September 2022)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948

*International Covenant on Civil and Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016

